

## **KERJA SAMA PERTAHANAN JEPANG DAN FILIPINA DALAM MENGHADAPI ESKALASI KETEGANGAN DI LAUT CHINA SELATAN**

**Fahmi Eko Marthanto<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

The South China Sea has become a strategic region prone to conflict due to China's unilateral claims, which are opposed by neighboring countries including the Philippines. Japan, although not a direct claimant, has actively pursued defense cooperation with the Philippines in response to China's growing military activities. This study departs from the assumption that the cooperation is not merely symbolic, but strategically significant in maintaining regional stability. The research adopts a realist perspective and the concept of national interest to examine how both countries respond rationally to external threats. Using a qualitative method that combines literature review and interviews, the study finds that Japan-Philippines defense cooperation including the signing of the Reciprocal Access Agreement (RAA) and joint military exercises—aims to enhance deterrence against China. Furthermore, this partnership strengthens Japan's influence in the Indo-Pacific security architecture. The findings suggest that such cooperation not only bolsters the strategic position of both countries, but also reflects a consistent effort to balance power in a maritime region shaped by geopolitical rivalry.

Keywords: Japan, Philippines, South China Sea, defense cooperation

### **ABSTRAK**

Laut China Selatan menjadi kawasan strategis yang rawan konflik akibat klaim sepihak Tiongkok yang ditentang oleh negara-negara di sekitarnya, termasuk Filipina. Jepang, meskipun tidak memiliki klaim langsung, tetap aktif menjalin kerja sama pertahanan dengan Filipina sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas militer Tiongkok. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kerja sama tersebut bukan hanya bersifat simbolis, tetapi memiliki signifikansi strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan yang digunakan adalah teori realisme dan konsep kepentingan nasional, dengan menyoroti bagaimana kedua negara merespons ancaman secara rasional. Melalui metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kerja sama Jepang-Filipina termasuk penandatanganan *Reciprocal Access Agreement* (RAA) dan latihan militer gabungan—bertujuan memperkuat daya tangkal terhadap Tiongkok. Di sisi lain, kerja sama ini turut memperkuat pengaruh Jepang dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi strategis kedua negara, tetapi juga mencerminkan upaya konsisten dalam menyeimbangkan kekuatan di kawasan maritim yang penuh rivalitas geopolitik.

Kata Kunci: Jepang, Filipina, Laut China Selatan, kerja sama pertahanan

### **PENDAHULUAN**

Laut China Selatan telah menjadi salah satu kawasan dengan ketegangan geopolitik yang tinggi dalam beberapa dekade terakhir. Sengketa wilayah yang melibatkan beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, semakin meningkat akibat klaim sepihak dan ekspansi militer oleh Beijing. Jepang, meskipun tidak memiliki klaim langsung atas wilayah tersebut, turut berperan dalam dinamika keamanan regional melalui kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang berkepentingan, terutama Filipina. Kerja sama ini semakin intensif sebagai respons terhadap ancaman yang muncul di kawasan.

Secara de facto, Laut China Selatan menjadi medan persaingan strategis yang melibatkan berbagai aktor. China mengklaim hampir seluruh kawasan melalui konsep "*Nine-Dash Line*," yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 telah memutuskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum, tetapi Beijing menolak mengakui putusan tersebut dan terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan dengan membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan serta meningkatkan patroli angkatan laut dan penjaga pantainya (Permanent Court of Arbitration, 2016)

Filipina, sebagai salah satu negara yang paling terdampak, mengalami tekanan dari China dalam bentuk insiden di perairan zona ekonomi eksklusifnya (ZEE). Berbagai insiden seperti penangkapan nelayan Filipina oleh penjaga pantai China dan pemasangan penghalang apung di Scarborough Shoal menambah ketegangan di kawasan. Selain itu, China sering kali melakukan tindakan provokatif seperti penggunaan laser untuk mengganggu kapal penjaga pantai Filipina, manuver berbahaya yang mengancam keselamatan navigasi, serta pengerahan milisi maritim yang membatasi akses Filipina ke perairannya sendiri (Buckley & Elemia, 2024). Tindakan ini tidak hanya merugikan Filipina secara langsung tetapi juga mengancam stabilitas kawasan secara keseluruhan. Peningkatan aktivitas militer China di perairan yang disengketakan telah memicu reaksi dari negara-negara lain, termasuk peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik. Hal ini meningkatkan risiko insiden militer yang tidak disengaja, yang dapat berujung pada eskalasi konflik lebih lanjut. Selain itu, tindakan China juga menghambat aktivitas ekonomi di kawasan, seperti mengganggu rute perdagangan utama dan mengintimidasi perusahaan energi yang beroperasi di Laut China Selatan. Akibatnya, negara-negara ASEAN semakin sulit mencapai kesepakatan dalam *Code of Conduct* (CoC) yang bertujuan untuk mengelola ketegangan secara damai, karena adanya tekanan dan strategi *divide et impera* yang diterapkan oleh Beijing terhadap beberapa negara di kawasan.

Dalam konteks ini, Jepang sebagai sekutu utama AS di Asia Timur, semakin aktif dalam kerja sama pertahanan dengan Filipina guna menghadapi ancaman tersebut. Kerja sama pertahanan antara Jepang dan Filipina mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jepang telah memberikan bantuan militer kepada Filipina dalam bentuk kapal patroli, pesawat pengintai, dan peralatan militer lainnya. Pada Februari 2023, kedua negara menandatangani *Reciprocal Access Agreement* (RAA), yang memungkinkan pengerahan pasukan Jepang ke Filipina untuk latihan militer dan operasi kemanusiaan. Selain itu, Jepang juga memberikan dukungan dalam penguatan kapasitas maritim Filipina untuk meningkatkan kemampuan pertahanan terhadap ancaman eksternal. Dukungan tersebut mencakup penyediaan kapal patroli kelas *Multi-Role Response Vessel* (MRRV) yang diberikan kepada Penjaga Pantai Filipina, serta teknologi radar untuk meningkatkan pengawasan perairan.

Selain itu, Jepang aktif berpartisipasi dalam latihan militer gabungan seperti *Multilateral Maritime Cooperative Activity* (MMCA) yang melibatkan Angkatan Laut Filipina dan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF). Contohnya, pada tahun 2024 telah dilaksanakan MMCA ke-6, yang mana berdasarkan pada MMCA sebelumnya dan operasi kolaboratif yang sedang berlangsung, latihan ini meningkatkan interoperabilitas doktrin, taktik,

teknik, dan prosedur pertahanan di antara pasukan yang berpartisipasi. Dilaksanakan dengan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional, MMCA menekankan penghormatan terhadap keselamatan navigasi dan hak-hak maritim semua negara. Kegiatan Kerja Sama Maritim Multilateral ke-5 mencakup berbagai operasi terkoordinasi yang dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kemampuan maritim. Kegiatan yang dilakukan selama latihan ini mencakup pemeriksaan komunikasi untuk memastikan koordinasi yang lancar, Pertukaran Ahli Materi Pelajaran (*Subject Matter Expert Exchange - SMEE*), dan konferensi pra-layar untuk menyelaraskan tujuan operasional. Latihan taktik foto dan divisi juga dilakukan. Latihan ini menekankan strategi pertahanan kolaboratif dan memperkuat komitmen pasukan yang berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional (Naval News, 2024).

Untuk mengatasi ketegangan yang terus meningkat, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih sistematis dan kolaboratif. Jepang dan Filipina perlu memperkuat koordinasi dalam kebijakan pertahanan dan meningkatkan interoperabilitas militer guna merespons ancaman di Laut China Selatan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan frekuensi latihan militer bersama, perluasan bantuan teknologi pertahanan dari Jepang, serta mempererat hubungan trilateral dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan daya tangkal terhadap agresi China. Selain aspek militer, pendekatan diplomasi juga harus diutamakan. Jepang dan Filipina perlu mendorong komunitas internasional, termasuk ASEAN dan PBB, untuk menekan China agar mematuhi hukum internasional. Filipina juga diharapkan dapat memanfaatkan jalur diplomatik untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa, seperti Vietnam dan Malaysia, guna membangun aliansi yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas kawasan.

Jepang, sebagai negara yang menganut kebijakan pertahanan defensif berdasarkan konstitusi pasifisnya, juga harus menyesuaikan pendekatan agar tetap sesuai dengan prinsip keamanan kolektif. Transformasi kebijakan pertahanan Jepang yang lebih proaktif, sebagaimana terlihat dalam dokumen "National Security Strategy 2022," menunjukkan bahwa Jepang semakin siap mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menjadi sinyal bahwa Jepang berkomitmen untuk mendukung Filipina tidak hanya dalam aspek pertahanan militer tetapi juga dalam penguatan keamanan maritim secara luas.

## **KERANGKA ANALITIK**

Kerangka analitik yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Realisme sebagai pisau analisis utama untuk menjelaskan dinamika kerja sama pertahanan antara Jepang dan Filipina dalam merespons eskalasi ketegangan di Laut China Selatan. Pendekatan ini memandang bahwa hubungan antarnegara dibentuk oleh kepentingan nasional dan struktur sistem internasional yang bersifat anarkis (Waltz, 1979). Dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas pusat, negara sebagai aktor utama harus mengandalkan dirinya sendiri (*self-help*) untuk menjamin keamanan dan eksistensinya.

Salah satu fondasi utama dari perspektif realisme dijelaskan oleh Hans Morgenthau, yang menegaskan bahwa negara bertindak berdasarkan kalkulasi kekuasaan dan kepentingan

nasional (Morgenthau, 1948). Negara rasional akan terus berusaha mempertahankan dan memperluas kekuatannya demi bertahan hidup di tengah dinamika internasional yang kompetitif dan penuh ketidakpastian. Hal ini dapat mencakup peningkatan kekuatan militer, penguatan aliansi, dan pengaruh diplomasi.

Konsep anarki internasional sebagaimana dijelaskan oleh Kenneth Waltz (1979) menjelaskan bahwa tidak adanya otoritas global yang memaksa negara tunduk, menjadikan negara perlu menciptakan keamanan melalui kekuatan sendiri atau kerja sama strategis. Di sinilah relevansi realisme tampak dalam studi ini, ketika Jepang dan Filipina meski tidak terikat oleh aliansi formal seperti NATO memilih untuk memperkuat kerja sama pertahanan mereka demi menanggapi ekspansi kekuatan China di kawasan.

Selain itu, pendekatan ini juga menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai turunan utama. Menurut Donald E. Nuechterlein (1976), kepentingan nasional terdiri dari berbagai aspek, termasuk keamanan, ekonomi, dan nilai strategis yang dapat berubah tergantung situasi (H. NURLETTE, 2021). Dalam konteks ini, Jepang memiliki kepentingan menjaga stabilitas kawasan dan jalur perdagangan internasional, sementara Filipina ingin mempertahankan kedaulatan wilayah maritimnya dari tekanan Tiongkok.

Dengan demikian, kerja sama pertahanan Jepang-Filipina merupakan wujud dari strategi *balance of power* yang bertujuan menyeimbangkan kekuatan Tiongkok di Laut China Selatan. Bentuk kerja sama seperti *Reciprocal Access Agreement* (RAA), latihan militer bersama, hingga bantuan militer dari Jepang, mencerminkan upaya dua negara ini dalam meningkatkan daya tangkal melalui pendekatan realis yang menekankan kekuatan dan keamanan sebagai basis interaksi internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam kerja sama pertahanan Jepang dan Filipina di tengah ketegangan Laut China Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang relevan, didukung oleh catatan lapangan serta dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan menggali pengalaman subjektif aktor-aktor terkait dalam kerja sama pertahanan. Untuk menjaga validitas, digunakan triangulasi antar sumber data.

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (menyaring data relevan), penyajian data (menyusun dalam bentuk naratif atau tematik), dan penarikan kesimpulan (menafsirkan pola dan makna). Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil analisis bersifat mendalam dan akurat.

## **PEMBAHASAN**

Ketegangan di Laut China Selatan tidak hanya menjadi perhatian negara-negara yang terlibat langsung dalam sengketa wilayah, tetapi juga menarik keterlibatan aktor-aktor besar lainnya, termasuk Jepang. Wilayah ini memiliki kepentingan strategis yang besar karena merupakan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia dan kaya akan sumber daya alam, baik perikanan maupun cadangan energi. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah-langkah Tiongkok yang semakin agresif, seperti pembangunan pulau buatan dan penguatan militer di wilayah yang disengketakan, telah menimbulkan kekhawatiran luas. Bagi negara seperti

Filipina yang memiliki klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, dinamika ini menempatkan mereka dalam posisi sulit, baik secara militer maupun diplomatik.

Dalam konteks inilah Jepang muncul sebagai salah satu mitra pertahanan yang potensial bagi Filipina. Jepang bukanlah negara yang terlibat langsung dalam sengketa wilayah Laut China Selatan, tetapi ia memiliki kepentingan strategis yang tidak bisa diabaikan. Bagi Jepang, stabilitas di kawasan ini penting demi kelangsungan ekonomi nasional, terutama karena sekitar 90% impor energinya melalui jalur pelayaran di kawasan tersebut. Lebih jauh, Jepang juga memandang aktivitas Tiongkok di kawasan ini sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan keseimbangan kekuatan regional yang selama ini dijaga melalui kemitraan keamanan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara.

### **Bentuk-Bentuk Kerja Sama yang Terbangun**

Seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap tindakan ekspansif Tiongkok, kerja sama pertahanan antara Jepang dan Filipina semakin diperkuat. Salah satu pilar penting dalam kerja sama ini adalah perjanjian *Reciprocal Access Agreement* (RAA) yang ditandatangani pada 2023. Perjanjian ini memungkinkan pasukan dari kedua negara untuk saling mengunjungi dan melaksanakan pelatihan militer bersama di wilayah satu sama lain. Langkah ini menandai peningkatan signifikan dalam hubungan militer bilateral, mengingat bahwa RAA biasanya hanya disepakati oleh Jepang dengan negara-negara yang dianggap sebagai mitra strategis tingkat tinggi. Selain RAA, Jepang juga memberikan bantuan nyata dalam bentuk penyediaan kapal patroli, pesawat pengintai, serta peralatan radar yang membantu Filipina meningkatkan kapasitas pengawasannya di wilayah maritim yang disengketakan. Bantuan ini mencerminkan pendekatan pragmatis Jepang dalam mendukung sekutunya tanpa harus melibatkan diri secara langsung dalam konflik. Melalui transfer teknologi dan pelatihan militer, Jepang tidak hanya memperkuat posisi Filipina tetapi juga memperluas pengaruh strategisnya di kawasan Asia Tenggara.

### **Dimensi Kepentingan Nasional**

Kerja sama ini tidak dapat dilepaskan dari motif rasional negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Dalam perspektif realisme, negara merupakan aktor utama yang bertindak rasional dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam lingkungan global yang tidak memiliki otoritas tunggal, negara dituntut untuk mengandalkan diri sendiri (*self-help*) dan membangun kemitraan strategis guna melindungi eksistensinya.

Bagi Jepang, membantu Filipina adalah bagian dari strategi untuk menjaga kestabilan kawasan sekaligus mencegah dominasi tunggal oleh Tiongkok. Dengan memperkuat mitra-mitra strategisnya di Asia Tenggara, Jepang berusaha menciptakan penyeimbang terhadap pengaruh Tiongkok. Di sisi lain, Filipina juga memandang Jepang sebagai alternatif strategis selain Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan Filipina untuk memperluas opsi pertahanannya dan mengurangi ketergantungan terhadap satu aktor tunggal.

Menurut Donald Nuechterlein, kepentingan nasional dapat dibedakan menjadi empat dimensi utama: keamanan pertahanan, ekonomi, nilai-nilai ideologis, dan kesejahteraan umum. Dalam kasus Jepang dan Filipina, semua dimensi ini dapat ditemukan. Jepang berkepentingan menjaga stabilitas kawasan demi kelangsungan ekonomi dan nilai-nilai demokratis yang dianutnya, sementara Filipina berkepentingan dalam memperkuat kapasitas pertahanan untuk melindungi kedaulatannya dan menjaga legitimasi pemerintahannya di mata publik domestik.

### **Respon terhadap Militerisasi Tiongkok**

Militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan merupakan salah satu pemicu utama terjalannya kerja sama ini. Dengan membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan dan meningkatkan patroli militernya, Tiongkok telah menciptakan lingkungan strategis yang tidak stabil. Filipina, sebagai negara yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut, merasakan langsung tekanan militer dan diplomatik dari Beijing. Beberapa insiden penembakan meriam air dan pengusiran kapal-kapal nelayan Filipina oleh penjaga pantai Tiongkok telah memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Jepang, meskipun tidak bersengketa langsung di wilayah tersebut, melihat situasi ini sebagai preseden berbahaya yang dapat menular ke Laut China Timur, khususnya di sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang disengketakan dengan Tiongkok (NABABAN, 2023). Dengan membantu Filipina, Jepang secara tidak langsung memperkuat posisi negara-negara yang menentang klaim sepihak Tiongkok, sekaligus memperluas jaringan aliansi regionalnya di tengah naiknya ketegangan geopolitik global.

### **Tantangan dan Keterbatasan**

Meski kerja sama ini terlihat menjanjikan, bukan berarti tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya militer Filipina. Meskipun Jepang telah memberikan bantuan berupa alutsista dan pelatihan, Filipina masih menghadapi kesenjangan besar dalam hal teknologi dan kapasitas pertahanan jika dibandingkan dengan Tiongkok. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kerja sama bilateral dalam menghadapi ancaman nyata di lapangan.

Selain itu, tekanan diplomatik dari Tiongkok juga menjadi tantangan tersendiri. Filipina kerap berada dalam dilema antara menerima bantuan dari negara-negara sekutu dan menjaga hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok. Ketergantungan ekonomi Filipina terhadap investasi dan perdagangan dengan Tiongkok membuat negara ini harus memainkan strategi luar negeri yang sangat hati-hati.

Dinamika politik domestik juga bisa memengaruhi kesinambungan kerja sama ini. Filipina memiliki sejarah pemerintahan yang fluktuatif dalam hal orientasi kebijakan luar negeri. Misalnya, selama masa pemerintahan Presiden Duterte, kebijakan luar negeri cenderung condong ke arah Tiongkok, meskipun pada saat yang sama masih mempertahankan hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang. Perubahan kepemimpinan dapat memengaruhi arah dan intensitas kerja sama strategis ini.

### **Dinamika Strategis dan Adaptasi Kebijakan Pertahanan**

Kerja sama Jepang dan Filipina merupakan bagian dari pola yang lebih besar dalam arsitektur keamanan kawasan Asia. Negara-negara di Asia kini cenderung membangun kemitraan strategis bilateral atau minilateral sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan kebangkitan Tiongkok. Tidak adanya institusi keamanan kolektif seperti NATO di kawasan Asia membuat negara-negara harus bersandar pada jejaring kerja sama yang fleksibel dan fungsional. Jepang juga aktif menjalin kerja sama serupa dengan negara-negara lain seperti Australia, India, dan Vietnam. Dalam konteks ini, hubungan Jepang-Filipina dapat dilihat sebagai salah satu simpul penting dalam rantai kemitraan strategis regional. Meskipun tidak dalam bentuk aliansi militer formal, kerja sama ini memiliki efek deterens yang kuat terhadap potensi agresi dari aktor eksternal.

Di tengah transformasi geopolitik global, terutama dengan meningkatnya kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik mulai memosisikan diri lebih aktif. Tidak lagi hanya menjadi penonton dalam pertarungan kekuatan besar, mereka mulai membangun strategi sendiri dengan memperkuat kemitraan,

meningkatkan kapasitas militer, dan mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih mandiri.

Hubungan antara Jepang dan Filipina dalam sektor pertahanan tidak bisa dilepaskan dari konteks transformasi keamanan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Kedua negara tersebut kini menunjukkan orientasi kebijakan luar negeri yang lebih proaktif sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, serta penguatan postur militer Tiongkok.

Kebijakan pertahanan Jepang pasca-reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang menjadi elemen penting yang membuka ruang bagi Jepang untuk memperluas cakupan kerja sama militernya. Sejak pemerintahan Shinzo Abe, Jepang mulai menunjukkan minat terhadap kerja sama strategis di luar aliansinya dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Filipina muncul sebagai mitra kunci karena posisi geografisnya yang strategis serta posisinya sebagai negara demokratis yang berhadapan langsung dengan ekspansi pengaruh Tiongkok.

Dari sisi Filipina, orientasi kebijakan luar negeri yang semula condong ke Amerika Serikat sempat mengalami perubahan ketika Presiden Rodrigo Duterte menjabat. Namun, meskipun terjadi pergeseran retorik yang menandai keinginan untuk lebih dekat dengan Tiongkok, kebutuhan akan keamanan maritim tetap menjadi isu utama yang tidak dapat diabaikan. Inilah yang kemudian membuka ruang bagi Filipina untuk tetap menjalin kemitraan dengan negara-negara lain, termasuk Jepang, yang tidak membawa beban kolonial ataupun narasi campur tangan dalam urusan domestik.

Perubahan pendekatan ini berlanjut ke masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., di mana Filipina kembali menegaskan komitmennya terhadap kemitraan strategis yang lebih luas. Pemerintahan Marcos Jr. tidak hanya memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, tetapi juga secara aktif mendorong penguatan hubungan dengan Jepang dan Australia. Dalam konteks ini, kerja sama dengan Jepang mengambil bentuk konkret, seperti latihan militer gabungan, bantuan teknis, serta kemungkinan pembentukan perjanjian akses timbal balik (*Reciprocal Access Agreement/RAA*) yang memungkinkan kehadiran militer Jepang di Filipina secara terbatas.

Secara praktis, kerja sama ini terlihat dari latihan maritim bersama yang dilakukan antara pasukan bela diri Jepang dan militer Filipina. Latihan ini mencakup simulasi operasi pencarian dan penyelamatan, latihan pengawasan maritim, dan pertukaran pengetahuan teknis. Selain itu, Jepang juga memberikan bantuan berupa kapal patroli, radar pengawasan pantai, serta pelatihan keamanan siber dan intelijen.

Sementara dari perspektif politik domestik, baik Jepang maupun Filipina menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun dukungan internal terhadap kerja sama pertahanan. Di Jepang, isu peningkatan peran militer masih menjadi topik sensitif mengingat warisan sejarah Perang Dunia II. Meski demikian, adanya ancaman nyata dari Korea Utara dan ketegangan dengan Tiongkok membuat publik Jepang lebih terbuka terhadap pendekatan pertahanan kolektif.

Di sisi Filipina, terdapat kekhawatiran bahwa kerja sama militer dapat memancing ketegangan dengan Tiongkok, mitra dagang utama negara tersebut. Namun, pengalaman berulang dalam bentuk intimidasi dan tindakan agresif dari Tiongkok di wilayah Laut China Selatan memaksa pemerintah Filipina untuk bersikap tegas. Dalam hal ini, kerja sama dengan Jepang dipandang lebih netral secara politik dibandingkan dengan ketergantungan total terhadap Amerika Serikat, sehingga memberikan ruang manuver diplomatik yang lebih fleksibel. Perlu juga dicatat bahwa kerja sama ini beroperasi dalam ekosistem keamanan regional yang lebih luas. Jepang dan Filipina bukan satu-satunya aktor yang mengambil inisiatif dalam merespons dinamika kawasan. Negara seperti Australia, India, dan bahkan

negara-negara ASEAN lainnya turut memainkan peran penting dalam menciptakan arsitektur keamanan regional yang berimbang. Misalnya, dialog trilateral Jepang-AS-Filipina menjadi salah satu forum yang menunjukkan koordinasi strategis dalam menghadapi tantangan regional bersama, tanpa harus membentuk aliansi militer formal.

Lebih jauh lagi, pendekatan realisme klasik dapat digunakan untuk membaca pola-pola kerja sama ini sebagai bentuk *balancing* terhadap kekuatan dominan. Tiongkok, sebagai negara besar dengan kekuatan ekonomi dan militer yang terus berkembang, menciptakan ketidakseimbangan struktural di kawasan. Untuk mencegah kondisi unipolar regional yang memungkinkan dominasi satu aktor, negara-negara seperti Jepang dan Filipina membentuk aliansi longgar berdasarkan kebutuhan yang sama, yaitu mempertahankan stabilitas kawasan.

Hal menarik lainnya adalah transformasi narasi keamanan Jepang yang kini lebih menekankan pada konsep kontribusi proaktif terhadap perdamaian. Meski istilah ini terdengar normatif, dalam praktiknya Jepang telah mulai memainkan peran lebih besar dalam menyediakan bantuan teknis dan kapasitas pertahanan bagi negara-negara Asia Tenggara. Ini adalah bagian dari strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang digagas oleh Jepang untuk memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap bebas dari tekanan kekuatan besar, terbuka untuk perdagangan, dan stabil secara geopolitik.

Kerja sama Jepang-Filipina juga patut dilihat sebagai bagian dari upaya mempertahankan status quo regional yang berdasarkan aturan internasional. Dalam hal ini, keduanya menempatkan hukum laut internasional sebagai dasar utama klaim wilayah dan mekanisme penyelesaian sengketa. Posisi ini secara langsung menantang pendekatan Tiongkok yang cenderung mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen tahun 2016 yang menolak klaim sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan (Permanent Court of Arbitration, 2016).

Dengan berbagai dinamika tersebut, kerja sama pertahanan Jepang dan Filipina telah berkembang dari bentuk simbolik menjadi kemitraan strategis yang substansial. Hubungan ini tidak hanya memperkuat kapasitas pertahanan kedua negara, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada aktor lain bahwa stabilitas kawasan adalah kepentingan kolektif yang harus dijaga bersama. Dalam kerangka ini, realisme tidak hanya menjelaskan tindakan negara berdasarkan ancaman, tetapi juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana negara-negara dapat bertindak secara rasional dan strategis di tengah tekanan geopolitik yang kompleks.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kerja sama pertahanan antara Jepang dan Filipina merupakan langkah strategis dalam menghadapi eskalasi ketegangan di Laut China Selatan. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transfer teknologi dan peralatan militer, pelatihan bersama, hingga peningkatan interoperabilitas militer antara kedua negara. Dengan meningkatnya ancaman dari China yang semakin agresif dalam memperluas klaimnya di kawasan, kerja sama ini menjadi instrumen penting bagi Filipina untuk memperkuat kapasitas pertahanannya. Jepang, sebagai salah satu aktor utama dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik, memiliki kepentingan untuk mencegah China dari mendominasi Laut China Selatan. Oleh karena itu, dengan mendukung Filipina, Jepang tidak hanya memperkuat aliansinya tetapi juga menjaga keseimbangan kekuatan yang lebih stabil di kawasan. Dalam hal ini, kerja sama pertahanan Jepang-Filipina berfungsi sebagai langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan tindakan agresif lebih lanjut dari China.

Secara keseluruhan, kerja sama pertahanan Jepang-Filipina memiliki dampak signifikan terhadap keamanan maritim dan stabilitas kawasan. Dengan meningkatnya kemampuan pertahanan Filipina, negara ini dapat lebih efektif dalam menghadapi ancaman

dari China, baik dalam bentuk militer maupun non-militer. Jepang, sebagai mitra strategis, juga memperoleh manfaat dengan menjaga jalur perdagangan maritim tetap aman dan menghindari dominasi satu pihak di kawasan. Meskipun kerja sama ini berpotensi meningkatkan ketegangan dengan China, namun dalam jangka panjang, hal ini dapat berkontribusi pada terciptanya keseimbangan kekuatan yang lebih stabil di Indo-Pasifik.

Namun, ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi. Pertama, efektivitas kerja sama ini sangat bergantung pada kontinuitas kebijakan luar negeri masing-masing negara. Pergantian pemerintahan di Jepang maupun Filipina dapat mempengaruhi arah kerja sama ini di masa depan. Kedua, meskipun Filipina mendapatkan keuntungan dari peningkatan kapabilitas militernya, negara ini masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan infrastruktur pertahanan yang memadai untuk sepenuhnya mengimbangi ancaman dari China. Oleh karena itu, kerja sama ini harus terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak aktor, baik di tingkat bilateral maupun multilateral.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Berita

Buckley, C., & Elemlia, C. (2024, May 14). China Deploys Dozens of Ships to Block Philippine Protest Flotilla. *The New York Times*.

<https://www.nytimes.com/2024/05/14/world/asia/china-philippines-flotilla.html>

NABABAN, H. F. (2023, November 2). China-Jepang Bersitegang di Laut China Timur.

*Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/artikel/china-jepang-bersitegang-di-laut-china-timur>

Naval News. (2024, September 12). Japan, Philippines and US Conduct 5th Multilateral

Maritime Cooperative Activity. *Naval News*. <https://www.navalnews.com/naval-news/2024/12/japan-philippines-and-us-conduct-5th-multilateral-maritime-cooperative-activity/>

### Buku

Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*.

Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*.

### Kasus

The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China) (2016). <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>

### Skripsi

H. NURLETTE, W. T. (2021). *KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERJANJIAN PEACE KOLOMBIA [UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR]*. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/240>